

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku atau Literatur

- Abdul Kadir Muhammad. 2002. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Adolf Huala. 2004. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Adrian Sutedi. 2006. *Hukum Perbankan*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Budiyanto. 2000. *Dasar-dasar Ilmu Tata Negar*. Jakarta: Erlangga.
- Chatamarrasjid. 2000. *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil)*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Djoni S. Gajali dan Rachmadi Usman. 2010. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fence Wantu. 2011. *Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan(Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Jimly Asshiddiqie. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Johannes Ibrahim. 2004. *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*. Bandung: CV. Utomo.

- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu. 2007. *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Johnny Ibrahim. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revis*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Jonker Sihombing. 2009. *Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah*. Bandung: PT.Alumni.
- Mardjono Reksodiputro. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Muhammad Djumhana. 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady 2002. *Doktrin-Doktrin Modern dalam Cooperate law dan eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Ni'matul Huda. 2006 *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Oyok Abuyamin. 2014. *Pilar-pilar Perpajakan..* Bandung: CV. Adoya Mitra Sejahtera.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rohmat Soemitro. 2007. *Teori Perpajakan dan Kasus*. Bandung: Eresco.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sentosa Sembiring. 2008. *Hukum Perbankan*. Bandung: CV.Mandar Maju.

Soerjono Soekant. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. 2006. Jakarta: Grafindo.

Ulber Silalahi. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Y Sri Susilo, Sigit Triandarudan, dan A Totok Budi Santoso. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Salemba Empat.

Yunus Husein. *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima.

B. Artikel dan Jurnal

Rinaldi, “Dampak Tax Amnesty Terhadap Laporan Keuangan dan Pengaruhnya Kepada Nilai Perusahaan”, Jurnal ADHUM Vol. VII No. 1, Januari 2017.

Nurita Kasmi, “Kerjasama Indoensia Dan Amerika Serikat Terkait Penerapan Foreign Account Tax Compliance Act (Fatca)”, Jurnal JOM FISIP Volume 2 No. 2, Pekanbaru: Jurusan Hubungan Internasional FISIP UR, Oktober 2015.

Anak Agung Gusti Chandra Pramita Sukawati, “Pengaturan Kewajiban Bank Menjaga Kerahasiaan Data Nasabah Penyimpan menurut Undang-undang Perbankan dikaitkan dengan Kebebasan Pers”, Thesis, Ilmu Hukum, Universitas Udayana, 2015.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional,

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/19/PBI /2000 tentang persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank

C. Pranala luar

Center for Indonesia Taxation Analysis, *Exchange of Information: Peluang dan Tantangan*, 2016, (<http://www.cita.or.id/wp-content/uploads/2016/02/Exchange-of-Information-Peluang-dan-Tantangan.>), 05 Februari 2016.

Chandra Dewi Puspitasari, *Penerobosan Rahasia Bank : Upaya Penegakan Kepatuhan Pajak*, 2012, (<http://eprints.uny.ac.id/2621/>), 24 Jul 2012.

Gunawan Pribadi dan Pande Putu Oka Kusumawardani, *Penerapan FATCA di Indonesia*, 2013, (https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2013_kajian_pkpn_FATCA%20%20Publikasi.pdf), 2 Desember 2013.

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/04/14/083000826/Apa.Perbedaan.Praktik.Penghindaran.Pajak.dan.Penggelapan.Pajak>. diunggah pada tanggal 14 April 2016 pukul 08.30 WIB.

<http://ksp.go.id/menyongsong-automatic-exchange-of-information-aeoi/> diunggah pada tanggal 3 Februari 2017.

<http://ksp.go.id/menyongsong-automatic-exchange-of-information-aeoi/> diunggah pada tanggal 3 Februari 2017.

<http://ksp.go.id/menyongsong-automatic-exchange-of-information-AEOI/> diunggah pada tanggal 3 Februari 2017.

<http://ksp.go.id/menyongsong-automatic-exchange-of-information-aeoi/>

diunggah pada tanggal 3 Februari 2017.

<http://setkab.go.id/perppu-no-12017-petugas-pajak-berwenang-peroleh-akses-informasi-perpajakan-dari-lembaga-jasa-keuangan/>,

diunggah

pada tanggal 17 Mei 2017.

<http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/>, diunggah pada 15 April 2014 dan diunggah pada 18 Maret 2017.

<http://wartaekonomi.co.id/read133631/pengampunan-pajak-dan-pertukaran-informasi-otomatis-i.html> diunggah pada tanggal 12 Maret 2017.

<http://wartaekonomi.co.id/read133631/pengampunan-pajak-dan-pertukaran-informasi-otomatis-i.html> diunggah pada tanggal 12 Maret 2017.

<http://wartaekonomi.co.id/read133631/pengampunan-pajak-dan-pertukaran-informasi-otomatis-i.html> diunggah pada tanggal 12 Maret 2017.

<http://wartaekonomi.co.id/read133631/pengampunan-pajak-dan-pertukaran-informasi-otomatis-i.html> diunggah pada tanggal 12 Maret 2017.

<http://www.ajarekonomi.com/2016/08/sekilas-tentang-organisation-for.html>, diunggah pada tanggal 4 Agustus 2016.

<http://www.fmeindonesia.org/menakar-kesiapan-indonesia-menghadapi-era-automatic-exchange-of-information-aeoi/>, diunggah pada tanggal 27 April 2017.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57c424fed80d3/> diunggah pada tanggal 30 Agustus 2016.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57c424fed80d3/> diunggah pada tanggal 30 Agustus 2016.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58bb8923887da/regulasi-yang-harus-dipersiapkan-jelang-implementasi-iautomatic-exchange-of-information-i>, diunggah pada tanggal 5 Maret 2017.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt592bdd6abdf5e/tak-ada-jaminan-data-keuangan-yang-dibuka-djp-tak-bakal-disalahgunakan>, diunggah pada tanggal 29 Mei 2017.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt592bdd6abdf5e/tak-ada-jaminan-data-keuangan-yang-dibuka-djp-tak-bakal-disalahgunakan>, diunggah pada tanggal 29 Mei 2017.

<http://www.hukumonline.com/berita/bacafoto/lt5979db13d023d/rapat-paripurna-dpr-setujui-apbnp-2017-dan-perppu-akses-perpajakan>, diunggah pada tanggal 27 Juli 2017.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt591a556ceaded/hukumnya-menyebarluaskan-identitas-orang-lain>, diunggah pada tanggal 19 Mei 2017.

<http://www.lembagapajak.com/2016/07/pengertian-pengampunan-pajak-tax-amnesty-adalah.html> diakses pada tanggal 16 Maret 2017 pukul 08.09 WIB.

<http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-wajib-pajak-dan-pengusaha-kena-pajak>, diunggah pada tanggal 6 Maret 2012.

<https://pajakku.com/page/detail/1097/urgensi-perppu-informasi-pajak>,

diunggah pada tanggal 19 Mei 2017.

<https://pajakku.com/page/detail/1097/urgensi-perppu-informasi-pajak>,

diunggah pada tanggal 19 Mei 2017.

[https://pemeriksaanpajak.com/2016/05/02/panama-papers-dan-](https://pemeriksaanpajak.com/2016/05/02/panama-papers-dan-penghindaran-pajak/)

[penghindaran-pajak/](https://pemeriksaanpajak.com/2016/05/02/panama-papers-dan-penghindaran-pajak/) diunggah pada tanggal 02 Mei 2016 pukul 20.00 WIB.

[https://pengampunanpajak.com/2017/03/15/tax-amnesty-18-hari-jelang-](https://pengampunanpajak.com/2017/03/15/tax-amnesty-18-hari-jelang-akhir-program-deklarasi-harta-dan-repatriasi-rp4-488-triliun/)

[akhir-program-deklarasi-harta-dan-repatriasi-rp4-488-triliun/](https://pengampunanpajak.com/2017/03/15/tax-amnesty-18-hari-jelang-akhir-program-deklarasi-harta-dan-repatriasi-rp4-488-triliun/) diunggah pada tanggal 15 Maret 2017.

[https://www.cermati.com/artikel/mengenal-aeoi-program-yang-membuat-](https://www.cermati.com/artikel/mengenal-aeoi-program-yang-membuat-pengemplang-pajak-tidak-bisa-kabur)

[pengemplang-pajak-tidak-bisa-kabur](https://www.cermati.com/artikel/mengenal-aeoi-program-yang-membuat-pengemplang-pajak-tidak-bisa-kabur), 18 April 2017.

[https://www.cermati.com/artikel/mengenal-aeoi-program-yang-membuat-](https://www.cermati.com/artikel/mengenal-aeoi-program-yang-membuat-pengemplang-pajak-tidak-bisa-kabur)

[pengemplang-pajak-tidak-bisa-kabur](https://www.cermati.com/artikel/mengenal-aeoi-program-yang-membuat-pengemplang-pajak-tidak-bisa-kabur), diunggah pada tanggal 18 April 2017.

[https://www.finansialku.com/setelah-amnesti-pajak-berakhir-kehadiran-](https://www.finansialku.com/setelah-amnesti-pajak-berakhir-kehadiran-aeoi-automatic-exchange-information-di-indonesia/)

[aeoi-automatic-exchange-information-di-indonesia/](https://www.finansialku.com/setelah-amnesti-pajak-berakhir-kehadiran-aeoi-automatic-exchange-information-di-indonesia/), diunggah pada tanggal 8 Mei 2017.

[https://www.kemenkeu.go.id/Artikel/fatca-vs-crs-dawn-justice-and-](https://www.kemenkeu.go.id/Artikel/fatca-vs-crs-dawn-justice-and-compliance)

[compliance](https://www.kemenkeu.go.id/Artikel/fatca-vs-crs-dawn-justice-and-compliance), diunggah pada tanggal 18 Juli 2016.

[https://www.kemenkeu.go.id/Artikel/perppu-nomor-1-tahun-2017-buka-](https://www.kemenkeu.go.id/Artikel/perppu-nomor-1-tahun-2017-buka-bukaan-data-hingga-perlindungan-data)

[bukaan-data-hingga-perlindungan-data](https://www.kemenkeu.go.id/Artikel/perppu-nomor-1-tahun-2017-buka-bukaan-data-hingga-perlindungan-data), diunggah pada tanggal 15 Juni 2017.

Jimly Asshiddiqie “Gagasan Negara Hukum Indonesia”.
([http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep Negara Hukum_Indonesia .pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf)), diunduh pada 18 Maret 2017.

OECD Center for Tax Policy and Administration. 2017. *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purpose : AEOI Status of Commitments*. (online),
(<http://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-commitments.pdf>, diakses pada tanggal 17 Juni 2017.

